

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2018/Khusus - Akhir Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SUB UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ZAENAL ARIFIN**
2. Jabatan : **CALON BUPATI**
3. NHK : **170463**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.148.300.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. Tanah Seluas 550 m2 di MAGELANG, WARISAN Rp. 11.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1565 m2/500 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 143.800.000
4. Tanah Seluas 861 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/63 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
6. Tanah Seluas 235 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah Seluas 305 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **377.500.000**

1. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 0
2. MOTOR, KAWASAKI LX SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PICK UP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
4. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000



5. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
6. MOTOR, HONDA CB Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
7. MOTOR, HONDA BSA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
8. MOTOR, HONDA - Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
9. MOBIL, MITSUBISHI JETSTAR Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	49.682.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	501.277.197
F. HARTA LAINNYA	Rp.	66.492.176
Sub Total	Rp.	2.143.251.373
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.143.251.373

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Maret 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.